

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk mengkaji atau meninjau kembali berbagai literatur, artikel dari jurnal, buku dan dokumen lainnya yang telah dipublikasikan oleh para peneliti yang masih bersangkutan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.

2.1.1 Otonomi Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 (enam) pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi merupakan wujud dari desentralisasi, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 (delapan) desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

2.1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Para ahli menjelaskan otonomi daerah dalam (Syamsuddin Haris, 2007:12-13) adalah sebagai berikut ini:

1. F. Sugeng Istianto

Menurut Sugeng Istianti otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.

2. Ateng Syarifuddin

Otonomi daerah menurut Ateng Syarifuddin adalah kebebasan atau kemandirian tapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang memiliki batas atau kemandirian yang diberi dengan dapat ditanggungjawabkan.

3. Syarif Saleh

Menurut Syarif Saleh otonomi daerah diartikan sebagai hak mengatur suatu wilayah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

4. Kansil

Kansil menjelaskan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturam perundang-undangan.

5. Widjaja

Widjaja menyatakan bahwa otonomi adalah bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur dengan memberi kekuasaan pada lingkup yang lebih sederhana.

6. Mahwood

Menurut Mahwood otonomi daerah adalah suatu hak dari publik untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara, baik dalam hal mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing

dan ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemegang kekuasaan.

7. Mariun

Mariun memandang otonomi daerah sebagai suatu kebebasan dan wewenang yang dimiliki suatu daerah sehingga daerah tersebut dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna tujuan bersama.

2.1.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk mengurangi berbagai beban pemerintah pusat dan mengatur urusan daerah yang dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk mempelajari, menanggapi, memahami, dan mengambil manfaat dari berbagai tren global dan meluas.

Pemerintah pusat diharapkan dapat fokus pada pembuatan kebijakan makro atau kebijakan yang lebih umum dan lebih mendasar, dan daerah yang didesentralisasi akan mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Hal ini merangsang inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah dan memperkuat komitmen mereka terhadap isu-isu lokal.

Pada hakikatnya, pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah,

peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan lain dari kebijakan pemerintah daerah antara lain kehidupan demokrasi, keadilan, pembangunan keadilan, pemajuan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan peran dan fungsi DPRD, dan hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah termasuk menjaga hubungan baik. Berikut ini juga merupakan tujuan dari otonomi daerah diantara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Umum

Umum di sini mengacu pada orang-orang dalam bidang tertentu yang mengelola otonomi. Dengan otonomi diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat terlayani secara optimal. Sistem otonomi akan memberikan respon yang cepat kepada mereka yang membutuhkan pelayanan, sehingga penduduk suatu wilayah dapat merasakan langsung manfaat dari otonomi ini.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Membuka akses pelayanan terbaik dan paling tepat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Tentu saja, daerah dapat menjalankan anggarannya sendiri melalui penggunaan hak dan wewenangnya secara benar dan bijaksana. Konsekuensi dari otonomi yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah nyata.

3. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah akan meningkat agar tidak kalah dengan daerah lain. Otonomi memunculkan kearifan lokal dan menambah warna keragaman, keunikan dan keistimewaan lokal. Keberagaman ini terkait dengan semboyan beda tapi tetap satu, atau yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika.

Secara umum, tujuan utama pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membagi tugas dengan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dapat berkonsentrasi untuk merumuskan kebijakan yang bersifat umum, menyeluruh, menyeluruh dan mendasar.

Pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas anggaran daerah. Segala sesuatu tentang penerimaan pajak, administrasi pajak daerah, politik daerah, pemerintah daerah dan tentunya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pemerintah pusat dibekali dengan kapasitas untuk mempelajari, merespon dan memahami berbagai tren global dan lebih luas, serta mendapatkan manfaat dari implementasi kebijakan otonomi daerah ini.

2.1.1.3 Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonomi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, berikut ini adalah faktor dan indikator dalam pembentukan daerah otonomi:

Tabel 2.1 Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonomi

Faktor	Indikator
1. Kependudukan	1. Jumlah Penduduk 2. Kepadatan Penduduk

Faktor	Indikator
2. Kemampuan Ekonomi	3. PDRB non migas perkapita 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Kontribusi PDRB non migas
3. Potensi Daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk 7. Rasio kelompok pertokoan pe 10.000 penduduk 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas 18. Presentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
4. Kemampuan Keuangan	20. Jumlah PDS 21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas
5. Sosial Budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk 24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk 25. Jumlah balai pertemuan
6. Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih 27. Jumlah organisasi kemasyarakatan
7. Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	33. Indeks pembangunan manusia

Faktor	Indikator
11. Rentang Kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)

Sumber : *PP No. 78 Tahun 2007*

2.1.2 Pemekaran Wilayah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah dalam Pasal 1 ayat 11 (sebelas) Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Secara umum pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Definisi pemekaran daerah sendiri adalah suatu bentuk usaha dari pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan rapi, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih baik secara administratif, maupun secara sumber potensi alam yang terdapat dalam sebuah daerah. Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan melahirkan pemekaran wilayah karena keinginan tiap wilayah yang besar untuk mengatur daerahnya sendiri.

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah calon kabupaten baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul terjadinya disparitas yang mencolok pada masa datang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru tersebut. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah.

2.1.2.1 Tujuan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya dalam peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup.

Secara umum tujuan pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan

pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban.

2.1.2.2 Kriteria dan Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Kriteria dan syarat-syarat pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 dipaparkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Kriteria dan Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Kriteria dan syarat-syarat pemekaran	
Syarat Administratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi; b. Persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur; c. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri. 2. Untuk kabupaten/kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan; b. Persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur; c. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Syarat Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor kemampuan ekonomi; 2. Potensi daerah; 3. Sosial budaya; 4. Sosial politik; 5. Kependudukan; 6. Luas daerah; 7. Pertahanan dan keamanan; 8. Kemampuan keuangan; 9. Kesejahteraan masyarakat; 10. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah.
Syarat Fisik Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi; 2. Minimal lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten; 3. Minimal empat kecamatan untuk pembentukan kota; 4. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007

2.1.3 Indeks Kinerja Ekonomi

Indeks kinerja ekonomi adalah sebuah keadaan dimana kondisi perekonomian yang dibangun oleh sebuah pemerintahan dapat ditunjukkan. Melalui kinerja ekonomi ini, daerah dapat menunjukkan sejauh apa mereka telah melakukan pembangunan ekonomi.

Indeks kinerja ekonomi daerah dapat digunakan apakah sebuah daerah mampu melaksanakan tujuan awal yang diberlakukannya otonomi daerah. Kinerja ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan variabel yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi atau pencapaian sebuah daerah dalam pembangunan ekonominya.

Fokus kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak. Indeks kinerja ekonomi daerah menunjukkan kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan. Angka indeks pada prinsipnya merupakan rata-rata dari keempat indikator di atas, yaitu pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi, serta angka kemiskinan.

Indikator pertumbuhan PDRB mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, indikator pertumbuhan PDRB per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan, rasio PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi, dan indikator angka kemiskinan mencerminkan pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi

tingkat kemiskinan. Kinerja ekonomi daerah yang positif akan membawa banyak pengaruh positif, baik dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dari segi pembangunan daerah itu sendiri.

2.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Wijono (2005), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga aspek yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menjelaskan tentang perkembangan perekonomian dari masa ke masa dengan sifat yang lebih dinamis. Output per kapita mendeskripsikan pada aspek output total (PDB) dan aspek jumlah penduduk. Kemudian jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam masa tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga secara sederhana diartikan sebagai peningkatan jangka panjang dalam total output (PDB) tidak masalah apakah peningkatannya lebih kecil atau lebih besar dari pertumbuhan penduduk atau jika pertumbuhan struktur ekonomi mengikutinya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi membawa pendapatan tambahan bagi orang-orang selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika pendapatan riil masyarakat dalam satu tahun lebih besar dari pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam arti ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (PN). Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan barang dan

jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDB atau PNB rill.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan gerak sebagai sektor pembangunan dan merupakan juga sumber penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan nilai tambah di perekonomian mengisyaratkan peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang bersifat internal di daerah yang bersangkutan, maupun dalam kaitannya dengan interaksi antar daerah.

Pertumbuhan PDRB (ECGI) dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$ECGI = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

ECGI : Pertumbuhan PDRB

$PDRB_t$: PDRB pada tahun t

$PDRB_{t-1}$: PDRB Pada sebelum tahun t

2.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB atau Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun, Pendapatan Per Kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan Per Kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

PDRB per kapita (WELFI) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$WELFI = \frac{\textit{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)}}{\textit{Total Jumlah Penduduk}}$$

Untuk menghitung pertumbuhan PDRB per kapita yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Pertumbuhan WELFI} = \frac{(WELFI_t - WELFI_{t-1})}{WELFI_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

WELFI : PDRB per kapita

WELFI_t : PDRB per kapita tahun t

WELFI_{t-1} : PDRB per kapita pada sebelum tahun t

2.1.3.3 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi

Peranan ekonomi suatu daerah dalam perekonomian regional merupakan cerminan kinerja ekonomi daerah dalam memberikan kontribusi terhadap daerah di sekitarnya. Semakin besar nilai kontribusi maka semakin besar pula kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam waktu satu wilayah atau dengan kata lain, menggambarkan seberapa besar kontribusi PRDB suatu daerah kabupaten/kota dalam PDRB provinsi.

Kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi (ESERI) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ESERI = \frac{PDRB \text{ kabupaten/kota}}{PRDB \text{ provinsi}} \times 100\%$$

Keterangan:

ESERI : Kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi

2.1.3.4 Kemiskinan

Pada tahun 1990, *World Bank* mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, *World Bank* memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam arti kemiskinan yaitu kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana cara membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, keterwakilan dan kebebasan.

UNDP (*United Nations Development Programme*) memberikan pengertian kemiskinan sebagai kondisi kekurangan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dianggap sebagai suatu keadaan dimana terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP mengartikan kemiskinan sebagai suatu masalah

multidimensi yang artinya bukan sekadar pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka Kemiskinan (POVEI) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$POVEI = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Keterangan:

POVEI : Angka Kemiskinan

2.1.3.5 Rumus Indeks Kinerja Ekonomi

Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) pada prinsipnya adalah rata-rata keempat indikator di atas menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Programme (UNDP), 2008 dan dalam Anna Yulianita, 2013. Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKE_{i,t} = \frac{(ECGI_{i,t} + WELFI_{i,t} + ESERI_{i,t} + (100 - POVEI_{i,t}))}{4}$$

Keterangan :

IKE : Indeks Kinerja Ekonomi

ECGI : Pertumbuhan PDRB

WELFI : Pertumbuhan PDRB Perkapita

ESERI : Kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi

POVEI : Angka Kemiskinan

i : Kabupaten/Kota i

t : Tahun ke t

Untuk menyusun indeks-indeks diatas perlu dipastikan bahwa variabel indikator masukannya memenuhi prinsip konsistensi, konsistensi artinya setiap indikator masukan harus searah. Contohnya, jika secara umum keseluruhan berarah positif (semakin mendekati 100 semakin baik), maka setiap indikator yang digunakan hendaknya juga berarah positif. Dalam penelitian ini indeks yang digunakan berarah positif. Artinya, kinerja ekonomi daerah menunjukkan kinerja yang semakin baik jika indeks semakin mendekati 100. Begitupun sebaliknya, kinerja ekonomi daerah menunjukkan kinerja yang semakin buruk jika indeks semakin menjauhi 100.

Terdapat indikator masukan yang berarah negatif yaitu angka kemiskinan (POVEI). Jika terdapat indikator yang berarah negatif (semakin mendekati 100 semakin buruk), maka harus dilakukan penyesuaian dengan melakukan reverse index dengan rumus sebagai berikut:

$$RI_{POVEI} = 100 - n_{POVEI}$$

Keterangan:

RI_{POVEI} : *Reverse Index* POVEI

n_{POVEI} : Nilai POVEI

2.1.4 Rasio Gini

Rasio gini adalah ukuran ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah. Rasio gini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yang membandingkan distribusi pendapatan aktual dengan distribusi sempurna (*equal distribution*). Rasio gini dihitung dengan membandingkan luas daerah antara kurva *Lorenz* aktual dan garis distribusi yang sempurna dengan total luas area di bawah garis distribusi sempurna. Semakin tinggi nilai rasio gini, semakin besar ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat.

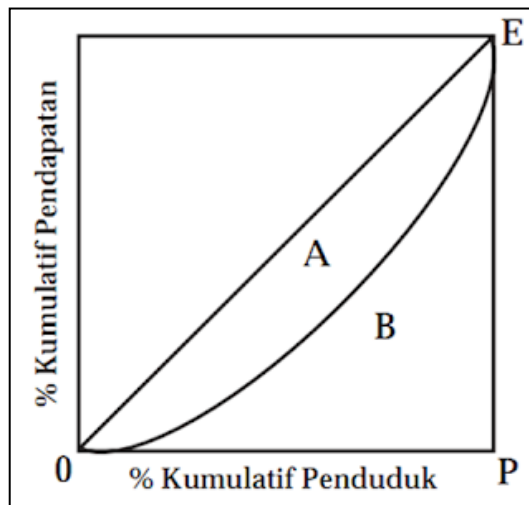
Rasio gini berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap individu memiliki pendapatan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang maksimum (satu individu memiliki seluruh pendapatan sementara yang lain tidak memiliki pendapatan sama sekali). Nilai rasio gini adalah sebagai berikut:

$RG < 0,3$: Ketimpangan rendah

$0,3 \leq RG \leq 0,5$: Ketimpangan sedang

$RG > 0,5$: Ketimpangan tinggi

Untuk menghitung rasio gini dibutuhkan kurva *Lorenz*, kurva *Lorenz* digunakan untuk menggambarkan suatu ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat atau kelompok yang sedang terjadi pada waktu tertentu.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Sumber: *Dokumen pribadi*

Dilihat dari Gambar 2.3 Kurva Lorenz, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin sampai terkaya) digambarkan oleh sumbu mendatar (horizontal) dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan oleh sumbu tegak (vertikal). Semakin dekat nilai kurva dengan garis diagonalnya, berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi dan semakin jauh nilai kurva dengan garis diagonalnya, berarti ketimpangan yang terjadi semakin kecil.

2.1.4.1 Rumus Rasio Gini

Untuk menghitung nilai rasio gini adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n [fp_i(Fc_i + Fc_{i-1})]$$

Keterangan:

fp_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{C_i} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

$F_{C_{i-1}}$: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $(i-1)$

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah suatu ukuran yang dipakai guna mengukur kemajuan dan kualitas hidup suatu negara atau wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah dasar kualitas hidup. Menurut Bakar (2021) indeks pembangunan manusia merupakan suatu angka untuk melihat hasil pembangunan manusia dengan indikator sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh individu.

UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 memaparkan suatu indikator yang sudah diteliti yaitu suatu indikator yang dapat menjelaskan perkembangan pembangunan manusia secara jelas dan mewakili suatu objek, yang dinamakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 0 hingga 100. Semakin mendekati angka 100, maka terindikasikan bahwa pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP (*United Nations Development Programme*) membagi golongan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kedalam 3 kelompok, yaitu:

1. $IPM < 50$: rendah
2. $50 \leq IPM \leq 80$: sedang/menengah

3. $IPM \geq 80$: tinggi

UNDP (*United Nations Development Programme*) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeksasi yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeksasi, yaitu:

1. Indeks Harapan Hidup
2. Indeks Pendidikan
3. Indeks Standar Hidup Layak

2.1.5.1 Rumus Indeks Pembangunan Manusia

Berikut ini merupakan rumus dalam mencari nilai angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

$$IPM = \frac{1}{3}(Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Y_1 : Indeks Harapan Hidup

Y_2 : Indeks Pendidikan

Y_3 : Indeks Standar Hidup Layak

2.2 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, penulis bertitik tolak dari beberapa penelitian terdahulu, terutama yang berkaitan dengan kinerja ekonomi daerah. Berikut ini tabel penelitian terdahulu yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Referensi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Abdul Hakim, 2017, Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, vol. 4, no. 1, Februari, 2017.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : – Kinerja Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi, – Pertumbuhan PDRB Per Kapita, – Rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi dan – Angka Kemiskinan.	Variabel: - Kinerja Pelayanan Publik - Rasio Siswa Per Sekolah, - Rasio Siswa Per Guru, - Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan - Ketersediaan Tenaga Kesehatan.	- Perumbuhan Ekonomi Kabupaten Meranti lebih baik daripada Kabupaten Bengkalis. - Pertumbuhan DPRB Per Kapita Kabupaten Meranti lebih baik daripada Kabupaten Bengkalis. - Rasio PDRB Kabupaten Bengkalis lebih baik daripada Kabupaten Meranti. - Angka Kemiskinan Kabupaten Bengkalis lebih baik daripada Kabupaten Meranti. - Aspek kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum belum mampu menyaingi kinerja daerah induknya yaitu Kabupaten Bengkalis, dengan kata lain dampak pemekaran belum menunjukkan hasil yang positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.
2.	Reza Septian Pradana, 2020, Perbandingan Kinerja	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:	Variabel kinerja pembangunan sosial dengan indikator:	– Kinerja Ekonomi Kabupaten Aceh Barat sebagai kabupaten induk secara statistik tidak

No	Peneliti, Tahun, Referensi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Sosial dan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pemekarannya tahun 2011-2019, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 2020, 11.1:11-25	<ul style="list-style-type: none"> – Kinerja Ekonomi daerah dengan indikator pertumbuhan ekonomi. – Angka Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> – Angka Harapan Hidup, – Rata-Rata Lama Sekolah, – Indeks Pembangunan Manusia 	<p>signifikan lebih tinggi dibandingkan kabupaten pemekarannya (Aceh Jaya, Nagan Raya dan Simeulue).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat tidak lebih baik daripada kabupaten hasil pemekarannya (Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue).
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Programme (UNDP), 2008, Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, BAPPENAS dan UNDP, 2008.	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kinerja Ekonomi Daerah – Pertumbuhan PDRB, – PDRB per kapita, rasio – PDRB kabupaten terhadap PDRB Provinsi dan – Angka kemiskinan. 	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kinerja Keuangan Daerah – Pelayanan Publik – Kinerja Aparatur Daerah 	<p>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa daerah-daerah pemekaran yang menjadi cakupan wilayah studi, secara umum memang tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Akan tetapi setelah dimekarkan, ternyata kondisi daerah otonom baru juga secara umum tetap masih berada di bawah kondisi daerah induk. Tingkat kemiskinan memang berkurang namun justru terkonsentrasi di daerah otonom baru. Dalam aspek pelayanan publik, belum lebih baik dibandingkan daerah induknya. Begitupun</p>

No	Peneliti, Tahun, Referensi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dalam aspek kinerja ekonomi, keuangan daerah dan aparatur daerah. Daerah otonom baru masih berada di bawah daerah induk.
4.	Ratri Furry. P. R dan Hadi Sasana, 2013, Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Di Kota Serang, <i>Diponegoro Journal Of Economics</i> , Volume 2, Nomor 3 tahun 2013, Hal 1-13.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: – Indeks Kinerja Ekonomi – Pertumbuhan PDRB, – Pertumbuhan PDRB per kapita, – Rasio PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi dan – Angka Kemiskinan.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: – Indeks Kinerja Pelayanan Publik – Bidang kesehatan yaitu – Bidang pendidikan yaitu:	Variabel Indeks Kinerja Ekonomi antara Kabupaten Serang dan Kota Serang lebih baik kinerja ekonomi Kota Serang daripada Kabupaten Serang. Walaupun hasil dari kinerja ekonomi pada akhir tahun menghasilkan angka yang hampir sama yaitu Kabupaten Serang sekitar 25,67 persen dan Kabupaten Serang sekitar 25,51, hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang sebagai kota hasil pemekaran sudah mampu sejajar dengan Kabupaten Serang sebagai kabupaten induknya
5.	Nyayu Neti Arianti dan Indra Cahyadinata, 2014, Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: – Kinerja Ekonomi – Pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI),		Hasil dari penelitian menunjukkan untuk perbandingan rata-rata variabel – pertumbuhan ekonomi (ECGI) daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah lebih rendah dibandingkan setelah pemekaran wilayah

No	Peneliti, Tahun, Referensi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir Di Provinsi Bengkulu, <i>Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIB, 2014, Hal 159-179.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB per kapita (WELFI), - Angka Kemiskinan (POVEI). 		sebelum pemekaran. <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata variabel PDRB per kapita (WELFI) daerah pesisir setelah pemekaran wilayah lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemekaran. - Rata-rata variabel angka kemiskinan (POVEI) daerah pesisir setelah pemekaran wilayah lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemekaran. - Hasil analisis kinerja ekonomi daerah induk, DOB dan daerah mekar pesisir di Provinsi Bengkulu setelah pemekaran menunjukkan bahwa: Pertumbuhan ekonomi daerah inti paling tinggi dan relatif stabil sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah DOB paling rendah dan cenderung fluktuatif, PDRB per kapita tertinggi terjadi di daerah inti dan yang terendah di DOB, dan Angka kemiskinan paling rendah terdapat di daerah indi dan yang tertinggi di

No	Peneliti, Tahun, Referensi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				DOB.
6.	Mutia Karina Tiffani, 2013, Tiffani, M. K. (2013). Analisis Komparasi Konvergensi, Aglomerasi, dan Kinerja Ekonomi Daerah Pada Daerah Pemekaran (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Bengkalis- Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2(1).	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: – Kinerja Ekonomi Daerah – Pertumbuhan PDRB – Pertumbuhan PDRB Per Kapita – Rasio PDRB terhadap PDRB Provinsi – Angka Kemiskinan	Adanya perhitungan : – Indeks shift share – Indeks williamson – Indeks Balassa	Pada dua kabupaten ini terdapat perbedaan kinerja ekonomi daerah pada periode setelah pemekaran daerah. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB per kapita dan Rasio PDRB terhadap PDRB Provinsi Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak lebih besar dari Kabupaten Bengkalis, namun peningkatannya, setelah kabupaten ini lepas dari Kabupaten Bengkalis lebih besar daripada Kabupaten Bengkalis. Begitu juga dalam pengurangan kemiskinan, angka kemiskinan terlihat lebih tinggi pada Kabupaten Bengkalis, namun pengurangan kemiskinan terlihat lebih baik pada Kabupaten Kepulauan Meranti.
7.	Raden Hady Santika, Budi Santoso dan Hadi Mahmudi, 2018, Analisis Dampak Pemekaran Daerah	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: – Pertumbuhan PDRB – PDRB Per Kapita	Variabel : – Jumlah Siswa – Jumlah Guru – Fasilitas Pendidikan – Jumlah Tenaga Kesehatan – Fasilitas Kesehatan	– Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Utara setelah pemekaran jauh lebih baik daripada Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Utara sebelum pemekaran. – PDRB Per Kapita Kabupaten Lombok Utara

No	Peneliti, Tahun, Referensi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3(1), 15-23.		<ul style="list-style-type: none"> – Panjang Jalan – Pelanggan PDAM – Pelanggan PLN 	setelah pemekaran jauh lebih baik daripada Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Utara sebelum pemekaran.
8.	Murniati, 2017, Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita Dikabupaten Kerinci. J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 2(1), 121-132.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> – PDRB Per Kapita 	Pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji <i>Paired Sample Test</i>	– PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci setelah pemekaran jauh lebih baik daripada PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci sebelum pemekaran.
9.	Anna Yulianita, 2013, Analisis Kinerja Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> – Kinerja Ekonomi Daerah – Pertumbuhan 	Dalam penelitian ini tidak menguji perbedaan antara kabupaten induk sebelum dan sesudah pemekaran.	Hasil penelitian menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> – Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) lebih baik setelah pemekaran dari pada Kota Prabumulih

No	Peneliti, Tahun, Referensi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Muara Enim (Kota Induk) Dengan Kota Prabumulih (Kota Baru). Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi, 1-47.	PDRB – Pertumbuhan PDRB Per Kapita – Rasio PDRB terhadap PDRB Provinsi – Angka Kemiskinan	Serta Variabel: Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	(Kota Baru). – PDRB Per Kapita Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) lebih baik setelah pemekaran dari pada Kota Prabumulih (Kota Baru). – Rasio PDRB terhadap PDRB Provinsi Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) lebih baik setelah pemekaran dari pada Kota Prabumulih (Kota Baru). – Angka Kemiskinan Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) lebih baik setelah pemekaran dari pada Kota Prabumulih (Kota Baru). – Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) lebih baik setelah pemekaran dari pada Kota Prabumulih (Kota Baru).

Sumber: *Dokumen Pribadi*

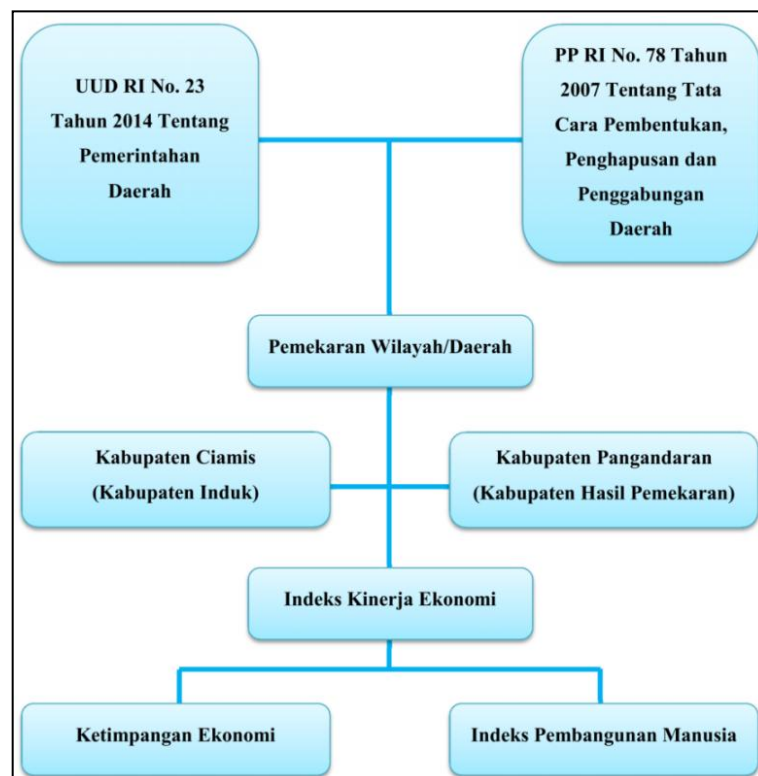
2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) dalam (Sugiyono, 2016) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Jika penelitian melibatkan lebih dari satu variabel, kerangka penelitian harus dinyatakan. Ketika sebuah penelitian hanya membahas satu atau lebih variabel secara individual, apa yang peneliti lakukan, selain memberikan penjelasan teoritis untuk setiap variabel, juga merupakan argumen untuk varians dari variabel yang diteliti (Sapto Haryoko, 1999) dalam (Sugiyono, 2016).

Bedasarkan hasil pemaparan tinjauan pustaka penulis memaparkan kerangka berpikir dalam penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Ekonomi Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran (Studi Sebelum dan Setelah Pemekaran)” sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: *Dokumen pribadi*

Dilihat dari Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran. Penulis menerangkan awal mula dari penelitian ini adalah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah menjadi dasar dalam pemekaran wilayah yang dalam pemekaran sendiri memiliki banyak tujuan salah satunya adalah Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu cara dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan peningkatan tingkat perekonomian ke arah yang lebih baik. Salah satu cara dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam perekonomian suatu daerah adalah dengan menggunakan parameter yaitu salah satunya adalah kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi ini dihitung berdasarkan pada indikator-indikator yang berhubungan dengan perekonomian, dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah pertumbuhan PDRB, pertumbuhan PDRB per kapita, kontribusi PDRB daerah terhadap pusat dan angka kemiskinan. Kemudian pada akhirnya menghasilkan nilai akhir yang disebut dengan indeks kinerja ekonomi.

Pemekaran Kabupaten Ciamis yang memekarkan Kabupaten Pangandaran merupakan suatu fenomena yang harus dipelajari. Dimana fenomena pemekaran wilayah merupakan keadaan atau kemauan suatu daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan dan masyarakat daerah tersebut secara mandiri. Dilihat dari awal pemekaran Kabupaten Ciamis yang memekarkan Kabupaten Pangandaran ditakutkan akan memberikan dampak yang buruk terhadap Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten hasil

pemekaran. Sebagai salah satu daerah yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap sektor-sektor perekonomian Kabupaten Ciamis khususnya sektor pariwisata dan sektor pertanian. Pemekaran Kabupaten Ciamis yang memekarkan Kabupaten Pangandaran layak dilakukan penelitian tentang perekonomian daerah masing-masing setelah pemekaran wilayah dilakukan, dengan cara membandingkan kinerja ekonomi masing-masing daerah.

Untuk melihat pengaruh nyata dari indeks kinerja ekonomi dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Peneliti juga menambahkan variabel lainnya yaitu ketimpangan ekonomi dan indeks pembangunan manusia untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan indeks kinerja ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara akan suatu temuan dalam suatu penelitian yang memiliki karakteristik yang hampir sama dan bahkan sama dengan penelitian terdahulu. Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau ditanggihkan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat perbedaan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran dengan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis sebelum pemekaran.
2. Diduga terdapat perbedaan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran dengan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran.
3. Diduga indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran berpengaruh signifikan terhadap rasio gini Kabupaten Ciamis setelah pemekaran.
4. Diduga indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Ciamis setelah pemekaran.
5. Diduga indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran berpengaruh signifikan terhadap rasio gini Kabupaten Pangandaran.
6. Diduga indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Pangandaran.